

IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Oleh: **DIPERJA PURBA & RIAMONA S. TULIS**

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Rumusan masalah adalah bagaimana implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah? Serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah?

Teori yang digunakan peneliti yaitu teori Implementasi Kebijakan dari Van Metter dan Van Horn yang dipengaruhi oleh enam variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh berdasarkan informasi dari staff bagian CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan masyarakat penerima bantuan dana program CSR itu sendiri. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu teknik analisis datanya berupa tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Hasil penelitian implementasi program CSR di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah belum terlaksana dengan optimal, hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang mengelola CSR masih kurang mumpuni serta tidak ada divisi khusus yang mengelola CSR itu sendiri sehingga program CSR yang dilaksanakan Bank Kalteng selama ini tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci : *Implementasi, Corporate Social Responsibility (CSR).*

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada. Contoh bentuk tanggung jawab sosial itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak yang kurang mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

Seiring dengan adanya kewajiban praktik CSR, banyak perusahaan di Indonesia mulai mengimplementasikan CSR di perusahaannya. Meskipun implementasinya lebih banyak dilakukan oleh perusahaan tambang dan manufaktur, industri perbankan juga telah menuliskan aspek pertanggungjawaban sosialnya kedalam laporan tahunan mereka. Praktik CSR perbankan tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi berupa profit dan pertumbuhan dalam fundamental, melainkan juga menambah kepercayaan dan semakin mendekatkan perbankan dengan masyarakat untuk perubahan sosial yang lebih baik.

Salah satu bank di Indonesia yang telah melaksanakan program CSR khususnya di daerah Kalimantan Tengah adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah kantor pusat Palangka Raya yang mewujudkan kepeduliannya dalam aspek pendidikan, kesehatan dan sosial. Dimulai dari tahun 2013 Bank Kalteng terus menyalurkan dana program CSR untuk membantu masyarakat Kalimantan Tengah. Di tahun 2013 dana program CSR yang disalurkan Bank Kalteng sebesar Rp 817.547.975 dengan realisasi 58 kegiatan diantaranya berupa bantuan untuk pembangunan Rumah Sakit Katolik Palangka Raya, bantuan bencana alam dan bantuan beasiswa untuk siswa SD, SMP dan SMA (Laporan Tahunan Bank Kalteng 2013:62-64), kemudian ditahun 2014 mengalami penurunan dana yaitu Rp 765.525.850 dan hanya merealisasikan 44 kegiatan diantaranya berupa bantuan untuk pembangunan gereja, pembangunan dermaga mini dan bantuan hewan qurban (Laporan Tahunan Bank Kalteng 2014:58-60), namun ditahun 2015 dana program CSR Bank Kalteng mengalami peningkatan signifikan yaitu Rp 1.545.794.250 dan merealisasikan 53 kegiatan seperti pembangunan halte tunggu kapal ferry, pengadaan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah dan bantuan pembuatan sarana permainan anak (Laporan Tahunan Bank Kalteng 2015:191-194).

Namun dalam mengimplementasikan program CSR tersebut di Bank kalteng tidaklah terbuka yang artinya keputusan yang diambil untuk membantu masyarakat sifatnya tertutup dan minimnya publikasi terhadap program CSR baik yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan. Pengimplementasian program CSR Bank Kalteng juga hanya didasarkan kepada sebuah proposal pengajuan bantuan dana program CSR yang notabene tidak dapat menjelaskan secara detail tentang suatu permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Selain itu, proposal pengajuan bantuan dana program CSR yang masuk ke dalam Bank Kalteng pun tidak sepenuhnya dibantu, banyak jenis proposal permohonan dana program CSR yang masuk dan kemudian ditolak oleh pihak perusahaan dengan alasan yang variatif.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk menyusun proposal penelitian dengan judul :” Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ?
2. Apa saja faktor yang menghambat implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ?

Tujuan Penelitian

1. Implentasi program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

LANDASAN TEORI

Konsep Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1992) dalam Agustino (2014:4) mendefinisikan “Public policy is whatever the government choose to do or not to do” (Kebijakan publik adalah apapun pilihan

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Konsep Implementasi

Implementasi merupakan suatu terjemahan dari bahasa Inggris yaitu implement. Kamus besar Webster dalam Endang Soetari (2014:232), to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dalam implementasi kebijakan menurut Metter terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik agen pelaksana
- d. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana
- e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut World Business Council For Sustainability Development (WBCSD) dalam Rahmatullah dan Trianita (2011:4) “*corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well of the local community and society at large*”. Tulisan WBCSD ini mendefinisikan CSR adalah komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya, demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas.

Motif perusahaan dalam melakukan CSR tetap berujung pada motif mencari keuntungan, perusahaan melakukan program CSR untuk menarik simpati masyarakat dengan membangun citra yang baik kepada masyarakat sehingga tercapailah suatu tujuan dalam menghasilkan untung. Perusahaan melakukan CSR untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Perusahaan dituntut agar berlaku etis terhadap masyarakat sekitarnya dan perusahaan harus ikut serta dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan juga menjaga lingkungan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dengan metode kualitatif akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang berupa kata, gambar dan bukan rumus-rumus maupun angka-angka. Penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk menggali dan menggambarkan berbagai realitas yang ditemui di lapangan untuk mengetahui

pengimplementasian Program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Fokus Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka menjadi fokus dalam penelitian ini adalah implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah berdasarkan Model Implementasi Kebijakan Publik Teori Model Van Metter & Van Horn dengan variabel;

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik agen pelaksana
- d. Disposisi para pelaksana
- e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Sumber Data

- a. Data Primer: Data digali dari informasi-informasi yang ada dimasyarakat, seperti masyarakat yang menerima CSR, pejabat yang bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang berhubungan dengan program CSR. Pada penelitian ini informan/narasumber yang akan diwawancarai adalah: Staff CSR Bank Kalteng dan Masyarakat
- b. Data Sekunder: Data ini diperoleh dari sumber-sumber yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan seperti profil perusahaan, catatan atau arsip perusahaan tersebut khususnya tentang kebijakan atau program-program PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan implementasi CSR.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini agar sesuai dengan data yang diinginkan, maka menggunakan beberapa teknik, yaitu: 1. Pengamatan (Observasi); 2. Wawancara (Interview); 3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian Data
- c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

PEMBAHASAN

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal

(bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tidak memiliki ukuran yang baku dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya sehingga dalam memberi bantuan Bank Kalteng hanya berpatokan pada proposal pengajuan dana yang diajukan masyarakat, sedangkan untuk tujuan Bank Kalteng melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) ini adalah sebagai bentuk kewajiban Bank Kalteng melaksanakan perintah Undang-Undang dan membantu masyarakat Kalimantan Tengah dalam aspek sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Sumberdaya manusia yang ada di Bank Kalteng terutama yang menangani CSR masih belum memadai. Hal tersebut terjadi karena Bank Kalteng tidak memiliki divisi khusus yang menangani CSR melainkan penambahan beban kerja kepada Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum sehingga program-program CSR selama ini tidak terkordinasi secara maksimal. Sumberdaya finansial yang ada di Bank Kalteng untuk melaksanakan CSR diperoleh dari laba berjalan perusahaan setiap tahun. Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bank Kalteng diberi batas maksimal realisasi anggaran CSR dalam satu tahun realisasi sehingga dalam memberikan bantuan Bank Kalteng harus memperhitungkan dengan benar alokasi dana tersebut agar tidak habis sebelum satu tahun realisasi. Sumberdaya waktu yang ada di Bank Kalteng untuk melaksanakan CSR adalah satu tahun realisasi. Bank Kalteng melaksanakan CSR dimulai dari buka tahun buku 1 januari hingga tutup tahun buku 31 desember. Waktu yang relatif singkat tersebut dapat mereka gunakan dengan baik sehingga tidak ada proposal permohonan yang ditunda hingga tahun berikutnya.

Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik ini tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak keras dan tegas.

Dalam mengimplementasikan program CSR ini Bank Kalteng tidak melibatkan organisasi formal maupun organisasi informal yang ada diluar dari perusahaan. Program CSR ini hanya dilaksanakan dan diputuskan oleh internal Bank Kalteng di Kantor Pusat saja

karena pelaksanaan CSR ini tidaklah dilakukan untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia melainkan sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memberi bantuan kepada masyarakat melalui program CSR perusahaan, sehingga agen yang diturunkan hanya sebatas pegawai internal Bank Kalteng saja.

Bank Kalteng diwajibkan mematuhi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagai dasar untuk melaksanakan CSR dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun sanksi hukum ini hanya berlaku kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagai agen pelaksana, sedangkan sanksi kepada masyarakat yang pernah menerima bantuan dana CSR dan tidak melampirkan laporan pertanggungjawaban hanya diberikan sanksi berupa penolakan proposal permohonan bantuan oleh Bank Kalteng dikemudian hari.

Sikap/Kecenderungan/Disposition Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti menemukan bahwa respon para agen pelaksana adalah menerima dan mendukung untuk melaksanakan program CSR sesuai amanat Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hanya saja Bank Kalteng tidak dapat membantu seluruh proposal yang masuk karena agen pelaksana harus memperhatikan kemampuan bank dan urgensi dari sebuah proposal permohonan dana.

Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

Sebuah komunikasi sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan program CSR ini. Komunikasi yang dilakukan oleh Bank Kalteng yaitu kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Bank Kalteng se-Kalimantan Tengah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selama ini komunikasi yang dilakukan berjalan dengan baik. Komunikasi antara Bank Kalteng dengan Pemerintah Provinsi dan Daerah yaitu untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar Bank Kalteng yang bertugas menyetujui perubahan Anggaran Dasar, Menyetujui Laporan Tahunan, menunjuk akuntan publik dan menentukan Kompensasi/ Remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan komunikasi antara Bank Kalteng dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu untuk mengkomunikasikan kegiatan keuangan Bank Kalteng dan sebagai lembaga pengawas keuangan. Dan komunikasi antara Bank Kalteng se- Kalimantan Tengah dengan Kantor Pusat terkait CSR ini yaitu untuk mengkomunikasikan tindak lanjut dari proposal bantuan dana dari masyarakat yang sudah dikirimkan oleh Kantor Cabang ke Kantor Pusat.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Lingkungan ekonomi yang ada di Bank Kalteng berasal dari masyarakat Kalimantan Tengah yang menjadi nasabah dan menabung uangnya di Bank Kalteng. Lingkungan ekonomi ini juga dipengaruhi dari antusiasme masyarakat untuk menabung di Bank Kalteng sebagai Bank Daerah. Lingkungan sosial yang ada di bank kalteng adalah keadaan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk Kalimantan Tengah dari waktu ke waktu yang mana pertumbuhan ini akan berimbas pada pertambahan jumlah nasabah bank kalteng. Para agen pelaksana meyakini bahwa pertumbuhan penduduk memberi sumbangsih besar terhadap pemasukan Bank Kalteng. Lingkungan Politik tidak ada hubungannya dalam melaksanakan program CSR di Bank Kalteng dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selama ini berjalan dengan lancar antara Bank Kalteng dengan Pemerintah Daerah/Provinsi.

Faktor Penghambat Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

- a. Kurangnya sumberdaya manusia di Bank Kalteng yang memiliki kemampuan atau latar belakang pendidikan khusus untuk menangani program CSR Bank Kalteng.
- b. Belum adanya divisi otonom yang tugas dan fungsinya menaungi program CSR Bank Kalteng sehingga program yang selama ini direalisasikan kurang terkordinasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2015. Metode Penelitian Kualitatif-Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor: DSDM.17/SK-0151/VII-16
- Laporan Tahunan Bank Kalteng 2013
- Laporan Tahunan Bank Kalteng 2014
- Laporan Tahunan Bank Kalteng 2015
- Nogi, Hessel. T. 2003. Teori dan Konsep Kebijakan Publik-Dalam Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: YPAPI.
- Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nurdizal, Rachman, Efendi dan Wicaksana, Emir. 2011. Panduan Lengkap Perencanaan CSR. Jakarta: Penebar Swadaya.

- Parson, Wayne.2014. Public Policy-Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Ed.5. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Rahmatullah & Trianita Kurniati. 2011. Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility). Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Rudito, Bambang dan Famiola, Melia. 2013. CSR (Corporate Social Responsibility). Bandung: Penerbit Rekayasa Sains
- Soetari, Endang. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas